BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan penjabarannya di atur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kecamatan, sebagai berikut :

a. Sesuai pasal 6 Perbub 52 / 2016, Tugas Kecamatan :

Membantu Bupati dalam meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Sesuai pasal 7 Perbup 52/2016, Fungsi Kecamatan :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Perbup 52 / 2019, Susunan Organisasi Kecamatan Alok Barat termasuk Tipe A terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
    a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    b) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Sosial dan Ekonomi;
g. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;
h. Kelurahan, terdiri atas :
    a) Lurah;
    b) Sekretariat Kelurahan;
    c) Seksi Pemerintahan;
    d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
    e) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Berdasarkan pasal 8 s/d 16 maka tugas dari masing masing jabatan sesuai susunan struktur Kecamatan Alok Barat (Tipe A), dan fungsi sebagai berikut :

(1) **Sekretariat Kecamatan** mempuyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.
Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(2) **Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan** dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) **Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset** mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.

Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
b. penatausahaan, akuntasi dan pembukuan keuangan dan aset;
c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
e. pelaksanaan urusan persuratan;
f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
g. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara;dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(4) **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakat tingkat Kelurahan;
h. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
j. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawatan Desa di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
l. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
o. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
p. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
q. pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
r. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(5) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
c. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(6) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(7) **Seksi Sosial dan Ekonomi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan

Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan falisitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar diwilayah kerjanya;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan;dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(8) **Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. pelaksanaan pencepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
i. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;

j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
k. pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi kecamatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka, yakni *Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Alok Barat* sehingga perlu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan sebagai berikut :

- Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Penerapan SOP
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
- Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan
- Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan.

1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat:

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat

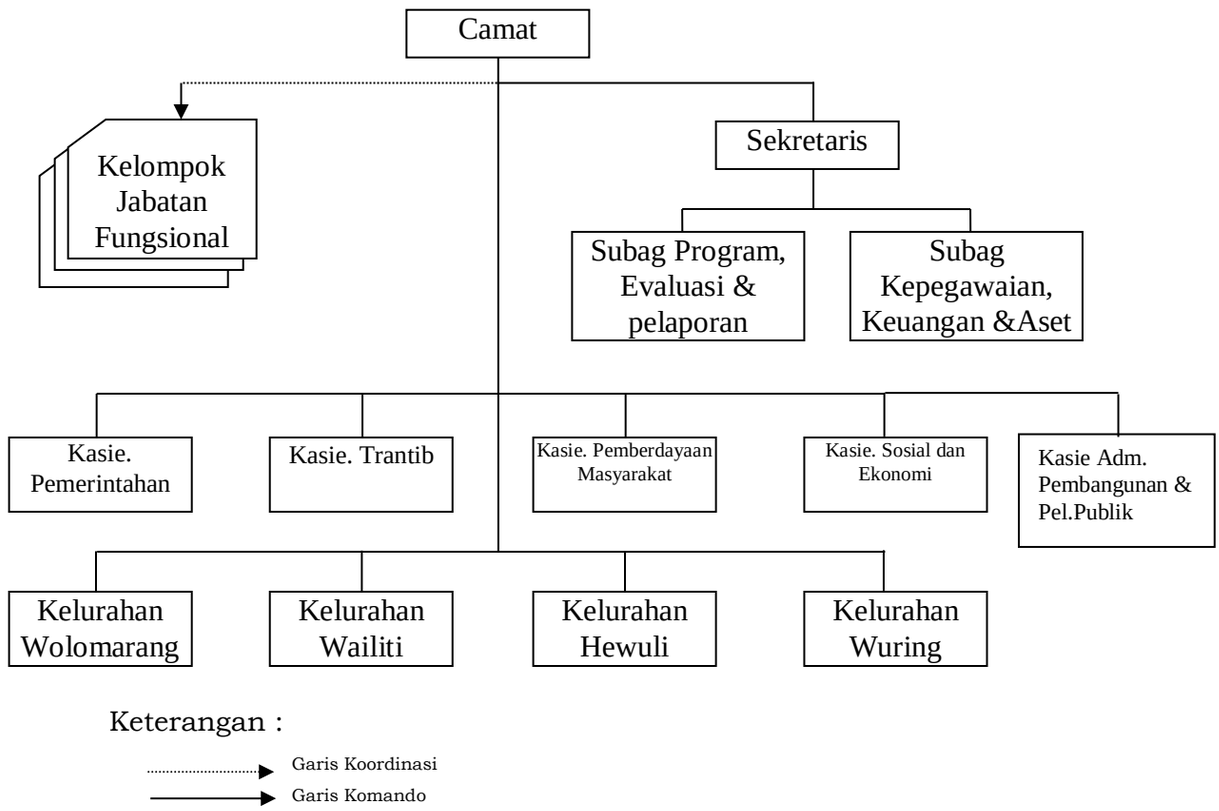

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok Barat di dukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Alok Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

A. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, dengan 5 kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan :
   a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. ***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***, dengan 1 kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan 1 sub kegiatan :
   a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

C. ***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***, dengan 1 kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 1 sub kegiatan :
   a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

1.5. Sistimatika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 maka Penyusunan Laporan Kinerja dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi
1.2. Aspek Strategis Organisasi
1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat
1.4. Kegiatan Layanan Produk Organisasi
1.5. Sistimatika Penyajian
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
BAB III : AKUNTABLILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Alok Barat
3.2. Realisasi Anggaran
BAB IV : P E N U T U P
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran

L A M P I R A N :

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023;
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023;
5. Penghargaan - penghargaan baik Lokal / Nasional / Internasional, Adipura.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Kecamatan Alok Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”

Formulasi visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

   Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

   Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Sikka mempunyai Misi yang jelas. **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari Visi yang telah ditetapkan tersebut. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka ditetapkan 1 tujuan pembangunan yaitu *Meningkatnya Kualitas*

Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran pembangunan daerah yaitu (a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, (b) Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan 6 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 5 strategi dan 5 arah arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Kecamatan Alok Barat bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018-2023. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat terkait erat dengan pencapaian Misi Kedua, yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat

Adapun Sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ALOK BARAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	41,1	42,1	43,2	44,3	71,89
		1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	-	-	-	-	-
		2 Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	100	100	100	100	100
			2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100
			3 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
			4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	100	100	100	100	100
			5 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Utama ini adalah merupakan tolak ukur kinerja tahunan untuk Kantor Camat Alok Barat dan 4 (empat) Kelurahan sebagai unit kerja dari Kantor Camat Alok Barat. Sehingga pada bab 3 nanti akan di jelaskan berbagai realisasi kinerja dari masing-masing kelurahan dan dari Kantor Camat Alok Barat.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN ALOK BARAT
DPPA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**
1.	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase	100
		2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Persentase	100
		3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100
		4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100
		5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100

Jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun 2023 sebesar : **Rp. 4.608.881.478**,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Don L. Usi Neno Da Silva, SE

Jabatan : Camat Alok Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardianus Firminus Parera, SE, M. Si

Jabatan : Penjabat Bupati Sikka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wailiti, 2 November 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARDIANUS F. PARERA, SE, M.Si	**DON L. USI NENO DA SILVA, SE**
	Pembina
	NIP. 19720121 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT ALOK BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**
1.	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Persentae	100
		2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Persentae	100
		3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentae	100
		4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentae	100
		5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentae	100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.605.258.578,-	APBD II
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	59.400.000,-	APBD II
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	944.222.900,-	APBD II

Wailiti, 2 November 2023

Pihak Kedua,

ARDIANUS F. PARERA, SE, M.Si

Pihak Pertama,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19720121 199903 1 007

RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN ALOK BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Anggaran
1.	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	%	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	59.400.000
		2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	%	100			
		3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	%	100			
		4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	%	100			
		5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	944.222.900
			%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	3.605.258.578

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Alok Barat selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Alok Barat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revew atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018 – 2023, dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Camat Alok Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Alok Barat, yang dapat dijelaskan dalam 6 (enam) bagian yaitu :

1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1
2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.2
3. Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.3
4. Analisis Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.4
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan yang mendukung Pencapaian Kinerja dari tiap-tiap Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.5

Dari masing – masing point diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Alok Barat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
2	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
3	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100	100	100
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100

Perlu diketahui bahwa Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 3.1 diatas adalah merupakan ***hasil perhitungan*** dari Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Alok Barat dan 4 (empat) Kelurahan sebagai unit kerja dari Kantor Kecamatan Alok Barat. Untuk penjelasan dari masing-masing sasaran diatas, disampaikan terlebih dahulu bahwa sasaran ke 1 (satu) sampai dengan sasaran ke 3 (tiga) merupakan penggabungan dari Kantor Camat Alok Barat dan 4 (empat) Kelurahan. Sedangkan untuk sasaran ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) hanya dimiliki Kantor Camat Alok Barat. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa untuk **realisasi index kepuasan**

masyarakat pada tahun 2023 sebesar **71,89%** dan **capaian kinerja** sebesar **100%.**

Analisis Capaian Kinerja pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran : *Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*

- **Pencapaian Indikator Sasaran 1 : *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan***

  Indikator ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung oleh 1 (Satu) kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

  1) Fasilitasi pelantikan LPM dan seleksi perangkat kelurahan;
  2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
  3) Monitoring dan pembinaan administrasi kelurahan dan administrasi keuangan kelurahan;
  4) Fasilitasi pembuatan daftar nominatif aparatur kelurahan dan LPM;
  5) Koordinasi penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
  6) Fasilitasi pendataan dan administrasi kependudukan;
  7) Verifikasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga;
  8) Verifikasi kelengkapan administrasi proses pengurusan sertifikat tanah.

Tabel 3.1.1

Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi :				
		✓ Seleksi Perangkat Kelurahan	Kelurahan	1	1	100
		✓ Pelantikan LPM	Kelurahan	1	1	100
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi Pembinaan Administrasi Kelurahan dan Administrasi Keuangan Kelurahan	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi Pembuatan Daftar Nominatif Aparatur Kelurahan dan LPM	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi pendataan dan administrasi kependudukan	Kelurahan	4	4	100

		Jumlah Verifikasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga	Jumlah	80	80	100
		Jumlah Verifikasi kelengkapan administrasi proses pengurusan sertifikat tanah	Jumlah	150	150	100
		JUMLAH				100

Berdasarkan Tabel 3.1.1 di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran 1 tahun 2023 sebagai berikut :

- ✓ Kelurahan yang difasilitasi Seleksi Perangkat Kelurahan dan Pelantikan LPM, Kelurahan yang dilakukan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pembinaan Administrasi Kelurahan dan Administrasi Keuangan Kelurahan, Pembuatan Daftar Nominatif Aparatur Kelurahan dan LPM dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan terget 4 Kelurahan, direalisasikan sesuai target 4 Kelurahan sehingga capaian kinerjanya **100%**. Adapun 4 Kelurahan yang dimaksud adalah :
  1) Kelurahan Wolomarang
  2) Kelurahan Wailiti
  3) Kelurahan Hewuli
  4) Kelurahan Wuring

- ❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 2 : *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat***

  Indikator ini dicapai melalui Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung oleh 1 (satu) kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :
  1) Fasilitasi pelaksanaan pengisian profil kelurahan dan profil kecamatan;
  2) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
  3) Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tani dan kelompok ternak;
  4) Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tenun ikat;
  5) Verifikasi pengajuan berkas surat keterangan ijin tempat usaha dan keterangan ijin usaha;
  6) Verifikasi pengajuan berkas surat keterangan kepemilikan kapal.

Tabel 3.1.2
Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Pengisian Profil Kelurahan dan Profil Kecamatan	Kelurahan dan Kecamatan	5	5	100
		Fasilitasi pembinaan dan Pengawasan Organisasi, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tani dan kelompok ternak	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tenun ikat	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah verifikasi pengajuan berkas surat keterangan ijin tempat usaha dan keterangan ijin usaha	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah verifikasi pengajuan berkas surat keterangan kepemilikan kapal	Kelurahan	4	4	100
		JUMLAH				100

Berdasarkan Tabel 3.1.2 di atas dapat dijelaskan secara terperinci analisis terhadap pencapaian Indikator Sasaran 2 tahun 2023 sebagai berikut :

- ✓ Bahwa kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengisian Profil Kelurahan dan Profil Kecamatan, Fasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tani dan kelompok ternak, Koordinasi dan monitoring kegiatan kelompok tenun ikat, Verifikasi pengajuan berkas surat keterangan ijin tempat usaha dan keterangan ijin usaha, Verifikasi pengajuan berkas surat keterangan kepemilikan kapal dilaksanakan pada 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut :
  1. Kelurahan Wolomarang
  2. Kelurahan Wailiti
  3. Kelurahan Hewuli
  4. Kelurahan Wuring

- ❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 3 : *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum***

  Indikator ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung oleh 1 (Satu) kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

  1) Koordinasi kegiatan keagamaan pada tingkat kelurahan;
  2) Koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  3) Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  4) Koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  5) Monitoring dan pembinaan linmas pada tingkat kelurahan;
  6) Monitoring dan pembinaan RT/RW pada tingkat kelurahan

Tabel 3.1.3

Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan pada tingkat kelurahan	kelurahan	4	4	100
		Jumlah fasilitasi dan penyelesaian kasus tanah	Jumlah Kasus	26	26	100
		Jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama	kelurahan	4	4	100
		Jumlah koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertibaan dengan Lintas Sektor	kelurahan	4	4	100
		Jumlah monitoring dan pembinaan Linmas pada tingkat kelurahan	kelurahan	4	4	100
		Jumlah monitoring dan pembinaan RT / RW pada tingkat kelurahan	kelurahan	4	4	100
		JUMLAH				100

Berdasarkan Tabel 3.1.3 di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator Sasaran 3 tahun 2023 sebagai berikut :

- ✓ Koordinasi kegiatan keagamaan pada tingkat kelurahan, Fasilitasi dan penyelesaian Kasus Tanah diwilayah kecamatan, Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, Koordinasi kegiatan ketentraman/ketertiban dengan Lintas Sektor, Koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, Monitoring dan pembinaan Linmas pada tingkat kelurahan, Monitoring dan pembinaan RT/RW pada tingkat kelurahan masing-masing terjadi pada 4 kelurahan, direalisasikan sesuai target 4 kelurahan sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun 4 kelurahan yang dimaksud adalah :
  1) Kelurahan Wolomarang
  2) Kelurahan Wailiti
  3) Kelurahan Hewuli
  4) Kelurahan Wuring
- ✓ Hasil penyiapan Laporan Kasus Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dan yang diselesaikan, Evaluasi Permasalahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kelurahan terealisasi dalam bentuk dokumen. Adapun kasus-kasus yang sering terjadi pada 4 (empat) kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat adalah kasus kepemilikan lahan.
  - Kasus kepemilikan lahan yang pada :
    1. Kelurahan Wailiti : 16 kasus
    2. Kelurahan Hewuli : 2 kasus
    3. Kelurahan Wuring : 3 kasus
    4. Kelurahan Wolomarang : 5 kasus
  - Kasus kepemilikan lahan yang telah diselesaikan:
    1. Kelurahan Wailiti : 16 kasus
    2. Kelurahan Hewuli : 2 kasus
    3. Kelurahan Wuring : 2 kasus
    4. Kelurahan Wolomarang : 5 kasus

❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 4 : *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sosial Ekonomi.***

Indikator ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung oleh 1 (Satu) kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) berupa :

1. Monitoring kegiatan posyandu kelurahan;
2. Pendataan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Pendataan jumlah sarana pendidikan tingkat kecamatan;
4. Pendataan jumlah sarana dan prasarana kesehatan pada tingkat kecamatan;
5. Pendataan jumlah kepala keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. Pendataan jumlah kepala keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Bahan Non Tunai (BNT);
7. Pendataan jumlah kepala keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM);
8. Koordinasi kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan Puskesmas Wolomarang;
9. Validasi Surat Keterangan Tidak Mampu (Kesehatan dan Pendidikan);
10. Monitoring pemberian Imunisasi Bias Campak pada tingkat SD/MI;

. .

Tabel 3.1.4

Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sosial dan Ekonomi

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Jumlah Monitoring Kegiatan Posyandu Kelurahan	Posyandu	25	25	100
		Jumlah Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Sarana Pendidikan Tingkat Kecamatan				
		✓ Paud	Unit	9	9	100
		✓ TK	Unit	3	3	
		✓ SD	Unit	11	11	
		✓ SMP	Unit	3	3	
		✓ SMA/SMK	Unit	3	3	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Tingkat Kecamatan.				
		✓ Posyandu	Unit	25	25	100

		✓ Pustu	Unit	2	2	
		✓ Polindes	Unit	3	3	
		✓ Poskedes/Poskeskel`	Unit	1	1	
		✓ Puskesmas	Unit	1	1	
		Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)) Tunai dan Non Tunai	KK	1000	864	86,4
		Jumlah Validasi Surat Keterangan Tidak Mampu				
		✓ Kesehatan	Berkas	50	38	76
		✓ Pendidikan	Berkas	50	21	42
		Jumlah Monitoring pemberian Imunisasi Bias Campak pada tingkat SD/MI	SD/MI	9	9	100
		JUMLAH				100

Berdasarkan Tabel 3.1.4 di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran 4 tahun 2023 sebagai berikut :

- ✓ Jumlah Prasarana Pendidikan di Tingkat Kecamatan yang dilakukan pendataan sebanyak 29 sekolah, terdiri dari 9 PAUD, 3 TK, 11 SD/SDN, 3 SMP, dan 3 SMA/SMK.
- ✓ Jumlah Prasarana Kesehatan di Tingkat Kecamatan yang dilakukan pendataan sebanyak 32 prasarana, terdiri dari 25 Posyandu, 2 Pustu, 3 Polindes, 1 Poskesdes, dan 1 Puskesmas .
- ✓ Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tunai dan Non Tunai Berupa Beras, Telur, Ayam Beku sebanyak **864** KK, terdiri dari :
  1) Kelurahan Wolomarang sebanyak **310** KK
  2) Kelurahan Wailiti sebanyak **158** KK
  3) Kelurahan Hewuli sebanyak **208** KK
  4) Kelurahan Wuring sebanyak **188**KK
- ✓ Jumlah Kepala Keluarga yang dilayani Validasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), terdiri dari :
  1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Kesehatan :
     - Kelurahan Wolomarang sebanyak **18** KK
     - Kelurahan Wailiti sebanyak **9** KK
     - Kelurahan Hewuli sebanyak **-** KK
     - Kelurahan Wuring sebanyak **11** KK
  2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pendidikan :
     - Kelurahan Wolomarang sebanyak **6** KK
     - Kelurahan Wailiti sebanyak **7** KK
     - Kelurahan Hewuli sebanyak **2** KK
     - Kelurahan Wuring sebanyak **6** KK

❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 5 : *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik***

Indikator ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan didukung oleh 1 (satu) kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Uraian Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, berupa :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
2. Fasilitasi Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitas Umum;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
4. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
5. Jumlah Rekomendasi Dan Perizinan Yang Dikeluarkan.

Tabel 3.1.5

Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 5
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TAHUN 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Kecamatan Dan Kelurahan	5	5	100
		Fasilitasi Koordinasi	Kelurahan	4	4	100

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitas Umum				
		Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kelurahan	4	4	100
		Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kelurahan	4	4	100
		Jumlah Rekomendasi Dan Perizinan Yang Dikeluarkan	Rekomendasi	6	6	100
		JUMLAH				100

Berdasarkan Tabel 3.1.5 di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran 5 tahun 2023 sebagai berikut :

- ✓ Bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik ini juga memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitas Umum Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai target di 4 (empat) Kelurahan;
- ✓ Bidang ini juga mengeluarkan Rekomendasi Dan Perizinan selama tahun 2023 sebanyak 6 rekomendasi/perizinan menyangkut Rekomendasi Perihal Ijin Mendirikan Bangunan.

Selanjutnya untuk melihat hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 untuk masing-masing kelurahan, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Kelurahan Wuring :

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kelurahan Wuring
(Target IKU berdasarkan IKU Kecamatan Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepuasan masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Rekomendasi hasil koordinasi Seksi pemerintahan	%	100	100	100
2	Rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Rekomendasi hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
	Capaian Kinerja Kelurahan Wolomarang Tahun 2023				**100**

Dari tabel di atas dan berdasarkan Target IKU Kecamatan Alok Barat, dapat dijelaskan bahwa *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Wuring* dengan target utama **71,89%** dapat direalisasikan sebesar **100%**. Pemerintah Kelurahan melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dapat dijelaskan bahwa secara umum capain kinerja dari masing – masing indikator sasaran pada tahun 2023 *telah mencapai target* dari yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Alok Barat untuk tahun 2023.

Selanjutnya dapat dilihat hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Hewuli, sebagai berikut :

Kelurahan Hewuli :

Tabel .3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kelurahan Hewuli
(Target IKU berdasarkan IKU Kecamatan Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepuasan masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Rekomendasi hasil koordinasi Seksi pemerintahan	%	100	100	100
2	Rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Rekomendasi hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
	Capaian Kinerja Kelurahan Wolomarang Tahun 2023				**100**

Dari tabel di atas dan berdasarkan Target IKU Kecamatan Alok Barat, dapat dijelaskan pula bahwa *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Hewuli* dengan target utama **71,89%** dapat direalisasikan sebesar **100%**. Kantor Kelurahan Hewuli telah melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dan disini juga dapat dijelaskan bahwa secara umum capain kinerja dari masing – masing indikator sasaran pada tahun 2023 *telah mencapai target* dari yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Alok Barat.

Selanjutnya dapat dilihat hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Wailiti pada tabel berikut ini :

Kelurahan Wailiti :

Tabel .3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kelurahan Wailiti
(Target IKU berdasarkan IKU Kecamatan Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepuasan masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Rekomendasi hasil koordinasi Seksi pemerintahan	%	100	100	100
2	Rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Rekomendasi hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
	Capaian Kinerja Kelurahan Wolomarang Tahun 2023				**100**

Untuk kelurahan wailiti, dari tabel di atas dan berdasarkan Target IKU Kecamatan Alok Barat, dapat dijelaskan pula bahwa hasil *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Hewuli* dengan target utama **71,89%** dapat direalisasikan sebesar **100%**. Kantor Kelurahan Hewuli telah melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dan disini juga dapat dijelaskan bahwa secara umum capain kinerja dari masing – masing indikator sasaran pada tahun 2023 *telah mencapai target* dari yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Alok Barat.

Selanjutnya untuk Kelurahan Wolomarang sama seperti 3 (tiga) kelurahan lainnya. Pada tahun 2023 untuk *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama* juga mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kelurahan Wolomarang :

Tabel .3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kelurahan Wolomarang
(Target IKU berdasarkan IKU Kecamatan Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Kepuasan masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Rekomendasi hasil koordinasi Seksi pemerintahan	%	100	100	100
2	Rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Rekomendasi hasil koordinasi seksi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
	Capaian Kinerja Kelurahan Wolomarang Tahun 2023				**100**

Dari tabel di atas dan berdasarkan target IKU Kecamatan Alok Barat, dapat dijelaskan bahwa *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kelurahan Wolomarang* dengan target utama **71,89%** dapat direalisasikan sebesar **100%** dengan *capaian kinerja* sebesar **100%.** Pemerintah Kelurahan Wolomarang melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dapat dijelaskan bahwa secara umum capain kinerja dari masing – masing indikator sasaran pada tahun 2023 ***telah mencapai target*** dari yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Alok Barat, Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dari masing-masing seksi yaitu :

Seksi Pemerintahan, Permasalahan yang di hadapi dan solusinya yaitu :

1. Adanya keterbatasan data penduduk dari tahun-tahun sebelumnya. *Solusinya* yaitu data penduduk yang telah ada dari tahun sebelumnya hendaknya diarsipkan secara baik melalui hardcopy maupun softcopy;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan kependudukan. *Solusinya* adalah dengan memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan kependudukan kepada masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Permasalahan yang di hadapi untuk empat kelurahan dan solusinya yaitu :

1. Fasilitas Komputer/Laptop yang kurang memadai sehingga menghambat proses penginputan data.
   Solusinya adalah dengan memberikan tambahan fasilitas komputer/laptop sehingga proses penginputan data dapat terlaksana dengan baik dan cepat.
2. Sasaran wilayah kerja yang luas yang meliputi 49 RT dan 9 RW, tidak didukung dengan fasilitas kendaraan dinas yang cukup, sehingga menghambat urusan dalam pelaksanaan tugas seksi di lapangan. *Solusinya* adalah dengan memberikan fasilitas berupa kendaraan roda 2 (dua) sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik.
3. Kurangnya kesadaran dari ibu bayi/balita untuk mengikuti kegiatan posyandu. *Solusinya* adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada ibu bayi/balita tentang pentingnya kegiatan posyandu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Permasalahan yang di hadapi dan solusinya, yaitu :

1. Masyarakat kurang memahami aturan-aturan pemerintahan terkait aturan ketentraman dan ketertiban umum. Solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi/pemahaman tentang aturan-aturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kurangnya kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan di lapangan. *Solusinya* yaitu dengan memberikan fasilitas kendaraan roda dua sehingga pelaksanaan tugas dilapangan dapat dilaksakana dengan baik dan cepat.

2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023 dan Tahun 2022
Kantor Camat Alok Barat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Pertumbuhan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023
1	2	3	4	5	6=(4-5)/5x100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**43,86**	**63,91**
1.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase	100	100	-
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Persentase	100	100	-
3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100	-
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100	100	-
5.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	-

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, *Pertumbuhan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023* untuk Kecamatan Alok Barat adalah sebesar **63,91** dari realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **43,86.** Dan *Pertumbuhan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama* dari sasaran 1 sampai dengan sasaran 5 tidak mengalami perubahan.

Untuk melihat *Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2022* per kelurahan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Kelurahan Wuring :

Tabel. 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realissi Kinerja Thn **2023**	Realissi Kinerja Thn **2022**	Pertumbuhan Pencapaian Realiasasi Kinerja Thn **2022 dan 2023**
1	2	3	4	5	6=(4-5)/5x100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**43,86**	**63,91**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	**100**	**100**	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	**100**	**100**	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	**100**	**100**	-

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa untuk Kelurahan Wuring perbandingan realisasi dari masing-masing indikator kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 *mengalami pertumbuhan realiasasi kinerja*, dimana pada tahun 2022 mencapai 100% dan pada tahun 2023 juga mencapai 100%.

Kelurahan Hewuli :

Tabel. 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realissi Kinerja Thn **2023**	Realissi Kinerja Thn **2022**	Pertumbuhan Pencapaian Realiasasi Kinerja Thn **2022 dan 2023**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**43,86**	**63,91**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-

3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Sama seperti Kelurahan Wuring bahwa perbandingan realisasi dari masing-masing indikator kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 *tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pertumbuhan realiasasi kinerja*, dimana pada tahun 2022 mencapai 100% dan pada tahun 2023 juga mencapai 100%.

Kelurahan Wailiti :

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023 dan 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realissi Kinerja Thn **2023**	Realissi Kinerja Thn **2022**	Pertumbuhan Pencapaian Realiasasi Kinerja Thn **2022 dan 2023**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**43,86**	**63,91**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Dari tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Kelurahan Wailiti perbandingan realisasi dari masing-masing indikator kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 juga *tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pertumbuhan realiasasi kinerja*, dimana pada tahun 2022 mencapai 100% dan pada tahun 2023 juga mencapai 100%.

Kelurahan Wolomarang :

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realissi Kinerja Thn **2023**	Realissi Kinerja Thn **2022**	Pertumbuhan Pencapaian Realiasasi Kinerja Thn **2022 dan 2023**
1	2	3	4	5	6= 4-5/5 x 100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**43,86**	**63,91**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	**100**	**95**	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	**100**	**95**	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	**100**	**95**	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi dari ***masing-masing unsur indikator kinerja*** antara tahun 2022 dan tahun 2023 *mengalami kenaikan pertumbuhan realisasi kinerja*, dimana pada tahun 2022 mencapai 95% dan di ditahun 2023 mencapai angka 100%. Sehingga tingkat *Pertumbuhan Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023* mengalami kenaikan mencapai angka **63,91%.** Hal ini dapat dilihat dari kinerja ASN pada kantor Lurah Wolomarang dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat berbagai macam permasalahan/kendala yang telah dijelaskan diatas pada tabel 3.1 diatas.

3. Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Alok Barat
(Perhitungan berdasarkan kertas kerja Kec. Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	**71,89**	**71,89**	**100**
1.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
2.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
3.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100	*100*	*100*
5.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	*100*	*100*

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, *index kepuasan masyarakat* dari *Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023* sebesar **71,89**. Dan *Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah* sebesar **71,89** sehingga *Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir* sebesar **100%.** Hal ini juga dipengaruhi oleh unsur kesatu sampai unsur ketiga yang telah mencapai 100%, dan untuk unsur keempat dan kelima juga mencapai angka 100%.

Untuk melihat hasil Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 per kelurahan, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Kelurahan Wuring :

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode Renstra PD

No	Indikator Kinerja Utama	Index	Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Peroide Renstra PD	Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa *Prosentase Pencapaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir Periode Renstra* untuk Kelurahan Wuring mencapai angka **100.** Dan untuk masing-masing unsur indikator kinerja mencapai angka 100%. Hal ini pun dikarenakan adanya pelayanan yang baik dari ASN kantor Lurah Wuring dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelurahan Hewuli :

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama
Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode Renstra PD

No	Indikator Kinerja Utama	Index	Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Peroide Renstra PD	Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Untuk Kelurahan Hewuli, dapat dijelaskan bahwa *Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Periode Renstra*, dimana masing-masing indikator kinerja utama untuk setiap seksi telah mencapai angka **100%**. Dan untuk Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir mencapai angka **100**.

Kelurahan Wailiti :

Tabel 3.3

Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode Renstra PD

No	Indikator Kinerja Utama	Index	Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Peroide Renstra PD	Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa *Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Periode Renstra*, dimana masing-masing indikator kinerja utama untuk setiap seksi telah mencapai angka **100%**, dan prosentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir sebesar **100.**

Kelurahan Wolomarang :

Tabel 3.3

Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode Renstra PD

No	Indikator Kinerja Utama	Index	Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Peroide Renstra PD	Prosentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**100**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Dari tabel diatas, Kelurahan Wolomarang juga mempunyai prosentase yang sama dengan 3 (tiga) keluarahan lainnya. Dapat kita lihat bahwa *Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Periode Renstra*, untuk setiap unsur telah mencapai angka **100%**. Sehingga *prosentse capaian kinerja terhadap kondisi akhir* yang di dapat adalah sebesar **100%**.

4. Analisis Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 3.4
Analisis Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kecamatan Alok Barat
(Perhitungan menggunakan kertas kerja Kecamatan Alok Barat)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Realisasi dan Target
			Target	Realisasi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**0,00**
1.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
2.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
3.	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum*	*Persentase*	*100*	*100*	*100*
4.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100	100	*100*
5.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	*100*

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan target **71,89** realisasinya mencapai **71,89%**. Sehingga hasil dari *Perbandingan Pencapaian Kinerja Antara Realisasi dan Target* sebesar **0%.**

Untuk mengetahui *Analisis Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023* dari masing-masing keluarahan, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Kelurahan Wuring :

Tabel 3.4
Analisis Perbadingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Perbandingan Pencapaian Kinerja antara target dan realisasi
			Target	**Realisasi**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Index**	**71,89**	**71,89**	**-**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa *Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Indikator Utama* yang dicapai pada tahun 2023 mencapai angka 100%. Hal ini pun berpatokan dari target IKU Kecamatan Alok Barat pada tahun 2023 sebesar 71,89% dan dengan adanya *Realisasi Indikator Kinerja* yang mencapai 100%.

Kelurahan Hewuli :

Tabel 3.4
Analisis Perbadingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Perbandingan Pencapaian Kinerja antara target dan realisasi
			Target	**Realisasi**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**-**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Untuk kelurahan Hewuli tidak jauh berbeda dengan kelurahan Wuring, dapat dilihat bahwa Hasil pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 mempunyai hasil yang sama.

Kelurahan Wailti :

Tabel 3.4
Analisis Perbadingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	**Tahun 2023**		Perbandingan Pencapaian Kinerja antara target dan realisasi
			Target	**Realisasi**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**-**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Untuk kelurahan Wailiti sama dengan dua kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Wuring dan Hewuli., Dapat dilihat bahwa Hasil pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 mempunyai hasil yang sama. sehingga tidak terdapat *Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Indikator Utama* yang dicapai pada tahun 2023.

Kelurahan Wolomarang :

Tabel 3.4
Analisis Perbadingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Perbandingan Pencapaian Kinerja antara target dan realisasi
			Target	**Realisasi**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**-**
1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan	%	100	100	-
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat	%	100	100	-
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	-

Untuk Kelurahan Wolomarang sama juga dengan ketiga kelurahan lainnya, dimana pada tahun 2023 realisasinya hanya mencapai **71,89**. Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa *Perbandingan Pencapaian Kinerja antara Target Kinerja dan Realisasi* Kelurahan Wolomarang yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar **71,89**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau Peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
(sudah termasuk 4 kelurahan)
(perhitungan berdasarkan kertas kerja Kecamatan Alok Barat)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepusan Masyarakat	**71,89**	**71,89**	**100,00**	Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja didukung oleh mutu pelayanan yang sesuai dengan SOP, Komunikasi yang jelas dan konsisten serta adanya sikap jujur dan komitmen sesuai dengan tupoksi masing-masing
		1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase Capaian layanan Publik Kecamatan (PATEN)				
		2 Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 *Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan*	*100*	*100*	*100*	
			2 *Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat*	*100*	*100*	*100*	
			3 *Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum*	*100*	*100*	*100*	

			4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	100	100	100	
			5 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100	100	100	

- Keberhasilan terhadap pencapaian target dan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama disebabkan oleh beberapa faktor :
  1) Mutu pelayanan yang sesuai dengan penerapan SOP ;
  2) Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten ;
  3) Sikap jujur, komitmen dan demokratis ;
  4) Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, koordinasi serta penyelesaian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksi.

- Selain faktor pendorong keberhasilan, terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja, diantaranya :
  1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM);
  2) Jumlah personil secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai;
  3) Belum terpenuhinya sarana dan prasaranan pelyanan public yang memadai;
  4) Minimnya sumber dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- Alternative solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan antara lain :
  1) Mengusulkan penambahan anggaran ;
  2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;
  3) Mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ;
  4) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan.

6. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja dari Tiap-tiap Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 3.5
Program, Anggaran dan Realisasi Pencapaian IKU
Kantor Camatan Alok Barat dan Kelurahan Tahun 2023

Kantor Camat Alok Barat				
NO.	**PROGRAM**	**ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.024.137.553	2.840.102.754	93,91
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	59.400.000	59.400.000	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.900.000	4.900.000	100
	JUMLAH	**3.093.437.553,-**	**2.909.402.754,-**	**94,05**
	Jumlah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan		**416.647.665,-**	**11,02**
Kelurahan Wuring				
NO.	**PROGRAM**	**ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	161,270,117,-	119.122.080,-	73,86
2.	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	255.825.000,-	255.825.000,-	100
	JUMLAH	**417,095,117,-**	**374.947.080,-**	**89,89**
	Jumlah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan		**42.148.037**	**10,11**
Kelurahan Hewuli				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	107.063.684,-	93.491.220,-	87,32
2.	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	207.700.000,-	196.020.000,-	94,38
	JUMLAH	**314.763.684,-**	**289.511.220,-**	**91,98**

	Jumlah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan		**25.252.464,-**	**8,02**
Kelurahan Wailiti				
NO.	**PROGRAM**	**ANGGARAN**	**RELISASI**	**%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	129.936.485,-	128.113.720,-	98,60
2.	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	213.130.100,-	213.098.700,-	99.90
	JUMLAH	**343,066,585,-**	**341.212,420,-**	**99,46**
	Jumlah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan		**1.854.165,-**	**0,54**
Kelurahan Wolomarang				
NO.	**PROGRAM**	**ANGGARAN**	**RELISASI**	**%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	182.850.739,-	167.753.272,-	91,74
2.	Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan	257.667.800,-	246.468.000,-	95,65
	JUMLAH	**440.518.539,-**	**414.221.267,-**	**94.03**
	Jumlah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan		**26.297.267,-**	**5.97**

- Pada tahun 2023 Kecamatan Alok Barat melaksanakan 3 (Tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Kecamatan Alok Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.1
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
Kecamatan Alok Barat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	100	100	100	59.400.000	59.400.000	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	100	100	100			
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100			
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	100	100	100			
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100	100	100	944.222.900	921.311.700	97,57
						3.605.258.578	3. 337.492.046	92,57

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pencapaian Kinerja Sasaran 1 sampai dengan Sasaran 4 didukung oleh 1 (Satu) Program dan 1 (Satu) Kegiatan, yaitu :
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 59.400.000 atau 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Jasa Honorarium Tim Koordinasi dan Monitoring Tingkat Kecamatan dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

b. Pencapaian Kinerja Sasaran 5 didukung oleh 2 (Dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan , yaitu :
   - Program Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan dengan beberapa kegiatan, diantaranya :

     Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 944.222.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 921.311.700 atau 97,57%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 Tingkat Kecamatan Alok Barat dan Kelurahan.
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa kegiatan, diantaranya :

     (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.605.258.578,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3. 337.492.046,- atau 92,57%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, pembayaran Jasa Honorarium dan Lembur Pengelola Keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Alok Barat didukung anggaran sebesar **Rp. 4.608.881.478**,- *(Empat Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)* sesuai DPPA Kecamatan Alok Barat

Tahun Anggaran 2023. Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Visi Kantor Camat Alok Barat sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Rincian Realisasi Keuangan Tahun 2023
Kecamatan Alok Barat

NO.		PROGRAM	ANGGARAN	RELISASI	%
			4.608.881.478	**4.318.203.746**	**93,69**
1.		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3,605,258,578**	**3,337,492,046**	**92.57**
	1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8,000,000**	**8,000,000**	**100**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,000,000	8,000,000	100
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,988,318,370**	**2,799,035,984**	**93.67**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,878,263,170	2,698,412,984	93.75
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110,055,200	100,623,000	91.43
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141,894,600**	**110,218,305**	**77.68**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,792,900	4,301,500	89.75
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,273,600	42,478,005	82.85
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,459,300	3,500,000	54.19
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26,233,800	22,403,800	85.40
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,135,000	37,535,000	70.64
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,000,000**	**1,000,000**	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	1,000,000	100

	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400,701,433**	**367,690,295**	**91.76**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499,400	494,000	98.92
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,619,953	36,286,982	77.84
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,252,700	16,146,000	59.25
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,329,380	314,763,313	96.46
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65,344,175**	**51,547,462**	**78.89**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,509,775	45,813,062	78.30
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,834,400	5,734,400	83.90
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**59,400,000**	**59,400,000**	**100.00**
	1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**59,400,000**	**59,400,000**	**100.00**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	59,400,000	59,400,000	100.00
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**944,222,900**	**921,311,700**	**97.57**
	1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9,900,000**	**9,900,000**	**100.00**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,900,000	9,900,000	100.00
	2	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**934,322,900**	**911,411,700**	**97.55**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,388,800	12,389,000	71.25

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	857,334,100	844,422,700	98.49
		Evaluasi Kelurahan	59,600,00	54,600,000	91.61

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 3.605.258.578** ,- dengan realisasi sebesar **Rp. 3.337.492.046**,- atau **92,57%** dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100% yang digunakan untuk belanja Kertas dan Cover, belanja Bahan Cetak, pembayaran honorarium Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan selama 12 bulan dan belanja Lembur dengan rincian sub kegiatan :

a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%.

2 **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.988.318.370 terealisasi sebesar Rp. 2.799.035.984,- atau 93,67% yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pengelola Keuangan dan Honor Pengelola BMD selama 12 bulan serta Belanja Lembur dengan rincian sub kegiatan ;

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.878.263.170,- terealisasi sebesar Rp. 2.698.412.984,- atau 93,75% .

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.055.200,- terealisasi sebesar Rp. 100.623.000,- atau 91,43% .

3 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 141.894.600,- terealisasi sebesar Rp. 110.218.305,- atau 77,68% yang digunakan untuk pembayaran komponen listrik,

pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor, pembayaran bahan logistik kantor, pembayaran barang cetak dan penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan rincian sub kegiatan;

a **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.792.900,- terealisasi sebesar Rp. 4.301.500,- atau 89,75% .

b **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.273.600,- terealisasi sebesar Rp. 42.478.005,- atau 82,85%.

c **Sub Kegaiatan Logisik Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.459.300,- terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 54,19%

c **Sub Kegaiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.223.800,- terealisasi sebesar Rp. 22.403.800,- atau 85,40%.

d **Sub Kegaiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 53.135.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.535.000,- atau 70,64%.

4 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100% yang digunakan untuk belanja service peralatan dan mesin dengan rincian sub kegiatan;

a. **Sub Kegiatan Pengadaan hPeralatan dan Mesin Lainnya,** dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%

5 **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.701.433,- terealisasi sebesar Rp. 367.690.295,- atau 91,76% yang digunakan untuk pembayaran jasa surat menyurat, pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan pembayaran jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan dengan rincian sub kegiatan;

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 499.400,- terealisasi sebesar Rp. 499.400,- atau 100%

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.619.953,- terealisasi sebesar Rp. 36.286.982,- atau 77,84%

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,** dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.252.700,- terealisasi sebesar Rp. 16.164.00,- atau 59,25%

d. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 326.329.380,- terealisasi sebesar Rp. 314.763.313,- atau 96,46%

6 **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.344.175,- terealisasi sebesar Rp. 51.547.462,- atau 78,89% yang digunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 12 bulan dengan rincian sub kegiatan;

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.509.775,- terealisasi sebesar Rp. 45.813.062,- atau 78,30%

c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.834.400,- terealisasi sebesar Rp. 5.734.400,- atau 89,90%

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 59.400.000** ,- dengan realiasi sebesar **Rp. 59.400.000**,- atau **100%** dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.400.000,- terealisasi sebesar Rp 59.400.000,- atau 100% yang digunakan untuk pembayaran koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait selama 12 bulan dengan rincian sub kegiatan :

a **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.400.000,- atau 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 944.222.900** ,- dengan realiasi sebesar **Rp. 921.311.700**,- atau **97,57%** dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.900.000,- terealisasi sebesar Rp 9.900.00,- atau 100% yang digunakan untuk pembayaran kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan rincian sub kegiatan :

a. **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa** dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- atau 100%.

2 **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 934.322.900,- terealisasi sebesar Rp 911.411.700,- atau 97,55% yang digunakan untuk pembayaran kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, pemberdayaan masyarakat dikelurahan dan evaluasi kelurahan dengan rincian sub kegiatan :

a **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.388.800,- terealisasi sebesar Rp. 12.389.000,- atau 71,25%.

b **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 857.334.100,- terealisasi sebesar Rp. 844.422.700,- atau 98,49%.

c **Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan** dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.900.000,- atau 91,61%.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Alok Barat Tahun 2023 bermakna strategis dalam perjalanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang secara normatif merupakan kewajiban Camat untuk menyampaikan segala bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan baik yang termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 maupun kerjasama lintas sektor dan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara periodik, dengan demikian, maka laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Alok Barat secara berjenjang dalam kaitan dengan semangat Reformasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka yang terpilih Periode 2018-2023.

Dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja Kecamatan Alok Barat Tahun 2023, dapat dinyatakan ***sangat memuaskan*** sebab rata-rata ***capaian sasaran kinerja*** demi terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan Fasilitasi di bidang Peyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mencapai angka **100%**, dimana angka realisasi ini merupakan hasil perhitungan capaian sasaran kinerja selain dari Kantor Camat Alok Barat juga di tambah dengan capaian sasaran kinerja dari ke empat kelurahan yang merupakan unit dari Kecamatan Alok Barat.

Namun dengan adanya kondisi keuangan daerah kita saat ini, terdapat banyak program dan kegiatan yang tidak dapat di laksanaan untuk dapat memperoleh capaian sasaran kinerja yang lebih baik sesuai Perubahan RENSTRA 2023.

Ada pun kendala yang sering dihadapi dari masing-masing kelurahan maupun kecamatan, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah yang berhubungan dengan aturan Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban;
2. Adanya keterbatasan data penduduk dari tahun-tahun sebelumnya.
5. Kurangnya anggaran dan faslitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung capaia kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Alok Barat;

4. Sasaran wilayah kerja yang luas dan tidak didukung dengan fasilitas kendaraan dinas yang cukup, sehingga menghambat urusan dalam pelaksanaan tugas seksi di lapangan.
5. rendahnya koordinasi lintas sektor.

2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Alok Barat, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Alok Barat secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing - masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya;
e. peningkatan anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan.

Camat Alok Barat,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19730121 199903 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KECAMATAN ALOK BARAT

TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	**71,89**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	-	-
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Persentase	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100

Jumlah Anggaran : Rp. 4.608.881.478,-

Wailiti, 31 Desember 2023

CAMAT ALOK BARAT,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19730121 199903 1007

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN ALOK BARAT
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)		(4)	(5)		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**71,89**	**71,89**	**100**
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	-	-	-	-
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	Persentase	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	Persentase	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100

Jumlah Anggaran Tahun 2023 **Rp. 4.608.881.478,-**
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 **Rp. 4.318.203.746,-**

Wailiti, 31 Desember 2023

CAMAT ALOK BARAT,

DON L. USI NENO DA SILVA, SE
Pembina
NIP. 19730121 199903 1007